

**PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada SKPD Kabupaten Sleman)**

**Arindra Devi Susilawati
Sri Widodo**

ABSTRACT

This research was conducted to determine the effect of behavioral factors training organization, clarity of purpose and support superiors of the usefulness of regional financial accounting system (SAKD) on the local work unit of study on SKPD Sleman. Population in this research is unit of work device area (SKPD) Sleman. This research is a quantitative research. The type of data used in this study is the primary data. Data collection method was done by using questionnaire. The sampling technique used is purposive sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression with the help of SPSS program.

The results of this study indicate that the training, clarity of purpose and support of supervisors have a significant effect on the usefulness of regional financial accounting system. The result of hypothesis testing in this research is the training has a significant effect on the use of SAKD with significance level $<0,05$. The clarity of purpose has significant effect on the use of SAKD with significance level $<0,05$ and superior support significantly influence the use of SAKD with significance level $<0,05$. In this study independent variables (training, clarity of purpose and support of superiors) able to explain the dependent variable (usability of regional financial accounting system) of 91.7%.

Keywords: Training, Clarity of Purpose, Support Bosses and Regional Financial Accounting System.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) pada satuan kerja perangkat daerah studi pada SKPD Kabupaten Sleman. Populasi dalam penelitian ini yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan SAKD dengan tingkat signifikansi $<0,05$. Kejelasan tujuan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan SAKD dengan tingkat signifikansi $<0,05$ dan dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan SAKD dengan tingkat signifikansi $<0,05$. Dalam penelitian ini Variabel independen (pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan) mampu menjelaskan variabel dependen (kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah) sebesar 91,7%.

Kata kunci : Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bagian dalam menciptakan sistem yang *power share* pada setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Distribusi kewenangan atau kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan. Pengambilan keputusan mengenai ekonomi, politik dan sosial diperlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan (Latifah dan Sabeni, 2007). Pemberian otonomi daerah pada kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas.

Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintahan pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Oleh sebab itu penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menjadi salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi (Sri Dewi, 2001).

Pada organisasi pemerintah daerah, sistem akuntansi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan sistem akuntansi

pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang digunakan pada saat sekarang ini adalah sistem akuntansi yang mengacu pada kebijakan perundangan yaitu Permendagri No. 13/2006 yang kemudian direvisi pada Permendagri No.59/2007 dan direvisi kembali pada Permendagri No.21/2011. Suatu keberhasilan penerapan sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan penerapan suatu sistem (Bodnar dan Hopwood : 2003). Agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD ini maka perlu adanya faktor perilaku dalam suatu organisasi yang mendukung dalam penerapan SAKD tersebut, diantaranya adanya kejelasan tujuan suatu organisasi serta adanya dukungan atasan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD tersebut dalam memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik, karena SAKD dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel (Latifah dan Sabeni, 20017).

Pengembangan sistem sangat perlu dilakukan untuk menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan pemerintah daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981.

Krumweide (1998) menunjukkan bahwa faktor organisasional seperti pelatihan, kejelasan tujuan, serta dukungan atasan, berpengaruh positif terhadap implementasi inovasi sistem maupun perubahan model akuntansi manajemen.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena belum banyak yang melakukan penelitian mengenai Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, terutama pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan dan tempat dilakukannya

penelitian. Maka dari itu peneliti bermaksud meneliti kembali dengan judul **"Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah"**.

B. Tinjauan pustaka Keperilakuan organisasi

Faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Faktor-faktor tersebut didefinisikan sebagai berikut (Chenhall, 2004) : Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, Kejelasan Tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi, dan Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem.

Pelatihan adalah suatu proses belajar mengenai sebuah wacana pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan untuk penerapan hasil belajar yang sesuai dengan tuntutan tertentu.

Kejelasan tujuan diartikan ketika akan menerapkan SIKD, tujuan implementasi SIKD tersebut telah dijelaskan dan disepakati. Kejelasan tujuan memberikan gambaran ketika kita akan mengimplementasikan SIKD tujuan implementasi sistem tersebut harus jelas dan ringkas, dan telah ada persetujuan tentang tujuan implementasi SIKD, serta SIKD bermanfaat bagi semua bagian dalam Departemen atau Dinas.

Chenal (2004) mengungkapkan bahwa dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan penyediaan sumber daya yang diperlukan.

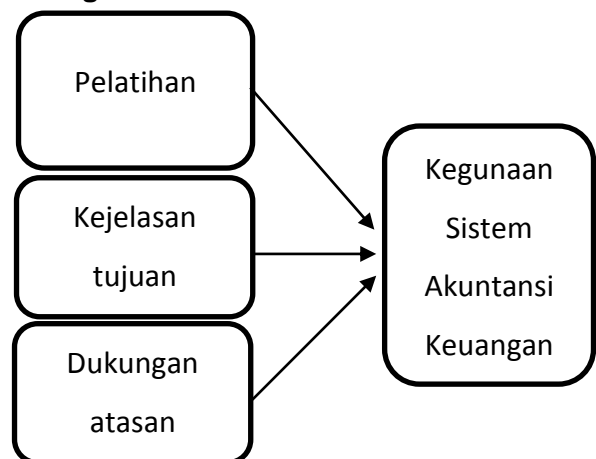
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) menjadi *output* (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Output-nya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi

serangkaian proses atau prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dana atau keterjadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan penjelasan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh, yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Kerangka berfikir



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan selama lima bulan mulai tanggal 08 Mei – 07 Agustus 2017. Lokasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Lingkungan Kabupaten Sleman. Jumlah sampel sebanyak 130 kuesioner yang disebar di lingkungan SKPD Kabupaten Sleman. Setelah terkumpul, data diproses menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang disebar sebanyak 130 dan yang kembali sebanyak 95 dan yang tidak kembali sebanyak 35 serta yang dapat diolah hanya 45 kuesioner. Hasil uji validitas dapat dilihat dari nilai *p value* untuk setiap pertanyaan variabel pelatihan dibawah 0,05,

pada variabel kejelasan tujuan dibawah 0,05 dan variabel dukungan atasan secara keseluruhan dibawah 0,05, pertanyaan variabel kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah secara keseluruhan dibawah 0,05, maka setiap pertanyaan kuesioner dapat dikatakan valid.

Hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel >0,70 yaitu variabel pelatihan 0,923, kejelasan tujuan 0,921, dan dukungan atasan 0,895. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang digunakan *reliabel* karena memiliki nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,70.

Uji hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 9
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients

model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	sig
	B	Std. error	B		
(constant)	3,566	1,271		2,806	0,0008
Pelatihan	0,320	0,109		2,942	0,0005
Kejelasan tujuan	0,268	0,126		2,134	0,039
Dukungan atasan	0,188	0,075		2,489	0,017
F hitung = 162,268					0,000
Adj R ² = 0,917					

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut:
 $Y = 3,566 + 0,320X_1 + 0,268 X_2 + 0,188X_3 + e$

Dimana:

Y = kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah

A = konstanta

B = koefisien arah regresi

X₁ = pelatihan

X₂ = kejelasan tujuan

X₃ = dukungan atasan

e = Error

Persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 3,566 yang artinya jika pelatihan (X₁), kejelasan tujuan (X₂), dan dukungan atasan (X₃) nilainya 0, maka kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (Y) nilainya adalah 3,566.

Nilai koefisien pada variabel X₁ bernilai positif yaitu sebesar 0,320, hal ini menunjukkan peningkatan pelatihan atau X₁ sebesar 1% maka akan meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 32% dengan asumsi bahwa variabel yang lain dianggap tetap. Nilai koefisien bertanda positif dan nilai signifikansi <0,05 menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Nilai koefisien pada variabel X₂ bernilai positif yaitu sebesar 0,268, hal ini menunjukkan peningkatan kejelasan tujuan atau X₂ sebesar 1% maka akan meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 26,8% dengan asumsi bahwa variabel yang lain dianggap tetap. Nilai koefisien bertanda positif dan nilai signifikansi <0,05 menunjukkan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh positif signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Nilai koefisien pada variabel X₃ bernilai positif yaitu sebesar 0,188, hal ini menunjukkan peningkatan dukungan atasan atau X₃ sebesar 1% maka akan meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 18,8% dengan asumsi bahwa variabel yang lain dianggap tetap. Nilai koefisien bertanda positif dan nilai signifikansi <0,05 menunjukkan bahwa dukungan atasan berpengaruh positif signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

b. Uji t (Partial Individual Test)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen. Probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (

Ghozali,2005). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.9.

Berdasarkan tabel 4.9 variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1) memiliki *p value* sebesar 0,000 (signifikan), karena *p-value* <0,05 dan memiliki nilai koefisien bertanda positif (+) ,hal ini berarti partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Variabel komitmen organisasi (X2) memiliki *p-value* sebesar 0,032 (signifikan), karena *p-value* <0,05 dan memiliki nilai koefisien bertanda positif (+) hal ini berarti komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

c. Uji F (*overall significance test*)

Uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F bertujuan untuk mengetahui secarasimultan dari variabel X₁, X₂, dan X₃ terhadap variabel terkait Y. Jika hasil pengujian diperoleh hasil nilai signifikan <0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji F pada tabel 4.9 menghasilkan nilai F hitung sebesar 162,268. Nilai signifikan dari hasil pengujian yang ditunjukkan tabel 4.9 menunjukkan nilai 0,000 maka secara keseluruhan variabel pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan mempunyai pengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

d. Koefisien determinasi (R²)

Tabel 4.9 diperoleh hasil pengujian pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan dan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai *Adjusted R²* sebesar 0,917. Artinya variabel independent mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 91,7% sedangkan yang 8,3% sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini (tidak diteliti).

Pembahasan

1. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan SAKD

Pengujian hipotesis 1 yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS diketahui nilai sig (H1) adalah 0,005 dibawah 0,05 sehingga (H1) yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh

signifikan terhadap kegunaan SAKD didukung atau diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Azlina (2012) yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Artinya semakin tinggi intensitas pelatihan, maka kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah intensitas pelatihan maka kegunaan sistem akuntansi keuangan akan semakin berkurang. Menurut Notoatmodjo (2009) pelatihan adalah suatu kegiatan peningkatan kemampuan karyawan atau pegawai dalam suatu institusi. Program pelatihan adalah salah satu strategi perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan kualitas kompetensi para pegawainya..

2. Kejelasan tujuan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan SAKD

Pengujian hipotesis 2 yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS diketahui nilai sig (H2) adalah 0,039 dibawah 0,05 sehingga (H2) yang menyatakan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan SAKD didukung atau diterima. Semakin tinggi kejelasan tujuan maka kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah juga akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Carolina (2012) dan Kayati (2016) yang menyatakan kejelasan tujuan berpengaruh signifikan positif terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Zahro, 2012).

3. Dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan SAKD.

Pengujian hipotesis 3 yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS diketahui nilai sig (H3) adalah 0,017 dibawah 0,05 sehingga (H3) yang menyatakan bahwa dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan SAKD didukung atau diterima. Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian Putranto (2014) dan Solichin (2015) yang menyatakan bahwa Dukungan Atasan berpengaruh signifikan positif terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Artinya semakin tinggi tingkat dukungan atasan maka kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin tinggi.

Sebaliknya semakin rendah dukungan atasan maka kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah semakin rendah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh faktor berperilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan SAKD. Sehingga H_1 yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat didukung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Kejelasan tujuan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan SAKD. Sehingga H_2 yang menyatakan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat didukung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan SAKD. Sehingga H_3 yang menyatakan bahwa dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat didukung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Saran

1. Agar dapat memastikan bahwa kuisisioner yang dikirim benar-benar diisi oleh objek yang diinginkan peneliti, maka penelitian selanjutnya memperkuat dengan metode wawancara atau observasi secara langsung.
2. Pihak pemerintah diharapkan mengubah pandangan bahwa kesuksesan sistem tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis dan dana,

namun faktor perilaku dari pengguna juga perlu diperhatikan.

Tindak Lanjut

Penelitian ini menguji pengaruh faktor berperilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah yang melibatkan sampel 25 SKPD. Penelitian dapat ditindak lanjuti dengan menguji seluruh SKPD di Kabupaten Sleman dan menambah faktor lain yang bisa meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan cara menambah variabel independen yang berhubungan dengan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chenhall, RH. (2004), The Role of Cognitif and Affective Conflict in Early implementation of Activity –Based Cost Management. *Behavioral Reaserch in Accounting* 16:19.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Mutivariate dengan program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Latifah dan Sabeni. (2007). Faktor Keperilaku Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi 10. Makasar.
- Kayati. (2016). Skripsi Pengaruh Faktor Keperilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah). Universitas Negeri Semarang.
- Krumweide, K. (1998). The Implementation stages of activity based costing and impact of contextual and organizational factors, *Journal of managemen Accounting Reasearch* 10
- Nurlaela, Siti dan Rahmawati. (2010). Pengaruh Faktor Keperilaku Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal Simposium*

Nasional Akuntansi 13. Universitas
Islam Batik dan Universitas Sebelas
Maret. Surakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas

Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Solihin, Ahmad Nur. (2015). Pengaruh Faktor
Keperilakuan Organisasi Terhadap
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di
Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.
Naskah Publikasi. Universitas
Muhammadiyah Surakarta.